

BAB I

REKAM JEJAK AWAL PERJALANAN PENELITIAN

“Laut nusantara adalah sumber kemakmuran bagi masyarakat Indonesia”

(Muhammad Yamin)

1.1 Pengantar

Pernyataan salah satu tokoh proklamasi Indonesia di atas mengingatkan kita akan pentingnya laut nusantara bagi kehidupan masyarakat. Kondisi ini membuka pikiran kita akan berbagai fenomena yang terjadi saat ini. Bab ini akan menyikap tabir dari realita sosial yang ada dalam berbagai bidang kelautan yang selama ini terjadi terutama pada permasalahan ekonomi nelayan yang menghadapi banyak tantangan dalam arus persaingan global. Fenomena tingginya impor ikan laut yang mengakibatkan ikan dalam negeri harus bersaing dengan harga murah, berdampak pada penurunan pendapatan nelayan.

Penurunan pendapatan nelayan akibat harga ikan laut yang harus bersaing dengan harga murah dapat di pangkas dengan memperpendek saluran pemasaran untuk mengurangi biaya yang terlalu besar. Sistem pemasaran tersebut harus diimbangi dengan tata kelola keuangan yang baik sebagai kontrol pengeluaran biaya. Peran tata kelola keuangan yang baik sangat diperlukan untuk memperbaiki ekonomi nelayan. Berangkat dari kajian tersebut penting untuk memperhatikan pengelolaan keuangan dalam mengatasi ekonomi nelayan. Inilah rekam jejak awal perjalanan penelitian yang menitikberatkan pada pengelolaan keuangan usaha organisasi sektor perikanan laut.

1.2 Latar Belakang

Sektor perikanan laut merupakan salah satu usaha ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat pesisir Indonesia dengan mengoptimalkan sumber daya laut yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan kajian *World & Economic Forum (WEF)* pada Konvensi di Swiss tahun 2001, variabel terpenting dari pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik adalah sektor kelautan yang akan menjadi *prime mover*¹, (Kusumastanto, 2012).

Peluang pemanfaatan sektor kelautan di Indonesia sebetulnya sangat besar. Namun fakta yang terjadi sebagai daerah gudang lautan dengan 2/3 dari wilayahnya merupakan laut, Indonesia justru masih melakukan impor ikan. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), neraca perdagangan komoditas perikanan nilai impor kelautan dan perikanan Indonesia mulai dari tahun 2007 sampai 2011 selalu terjadi kenaikan, mulai dari tahun 2007 sebesar US\$ 142.750, US\$ 267.659, US\$ 300.261, US\$ 391.815 hingga sampai 2011 sebesar US\$ 498.000 sehingga secara keseluruhan terjadi kenaikan rata-rata impor selama tahun 2007 sampai 2011 sebesar 39,32%.

Tingginya impor ikan laut tentu membawa dampak bagi kehidupan nelayan. Sebagaimana diungkapkan para pemasok ikan dari Cirebon dan Indramayu bahwa ikan beku asal Tiongkok telah menguasai pasar tradisional Jawa Barat. Sujai seorang pemasok ikan laut asal Cirebon mengatakan “Ikan beku China menyebar di sejumlah pasar tradisional Jawa Barat. Ikan lokal harus bersaing dengan harga murah” (Cirebon, SURYA Online (10 Mei 2014)).

¹ Penggerak Utama

Sektor kelautan seiring dengan perkembangannya menghadapi berbagai persoalan. Dalam realita ekonomi persoalan mengenai uang beredar pada sektor kelautan seperti terdapat pada berbagai fenomena yang ada tentu perlu mendapatkan perhatian khusus. Masalah keuangan yang ada di sektor kelautan inilah menjadi sangat menarik untuk diteliti.

Masalah lain yang menjadi sorotan tajam adalah terjadinya pencurian ikan ilegal. Sebagaimana diungkapkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, kerugian dari *illegal, unreported, and unregulated* (IUU) *fishing* di Indonesia mencapai Rp30 triliun (metrotvnews, 8 Juli 2014).

Kerugian tersebut secara tidak langsung tentu berdampak pada menurunnya jumlah ikan tangkapan nelayan akibat adanya penangkapan *illegal*. Dengan jumlah tangkapan yang semakin menurun sedangkan kebutuhan hidup yang harus terpenuhi dapat mengakibatkan nelayan melakukan segala hal dalam transaksi jual beli hasil laut demi dapat menyambung hidup. Hal tersebut mengakibatkan transaksi jual beli perikanan laut merupakan usaha yang rentan terjadi kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.

Ada beberapa penelitian terkait fenomena perikanan laut yang berhasil dikumpulkan peneliti. Riset Firdaus dkk (2008), menyoroti sektor kelautan dari sudut pandang ilmu hukum bahwa fenomena jual beli ikan pada perahu yang mengandung unsur ketidakadilan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Adalagi riset Manullang dkk (2007), yang mengkaji sektor kelautan berdasarkan prespektif sistem pemasaran. Hasil penelitiannya menjelaskan ada 3 saluran pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan. Setiap pedagang

mengemban paling sedikit 6 fungsi pemasaran yaitu fungsi penjualan, pembelian, transportasi, risiko, pembiayaan dan informasi pasar. Manullang (2007) ini menyarankan agar nelayan dapat membuat kelompok nelayan sehingga mereka dapat menentukan harga ikan hasil tangkapannya (*price maker*).

Melihat kondisi ekonomi kelautan yang selalu bergelut dengan berbagai masalah uang beredar mencakup dari segi harga ikan laut, impor ikan laut sampai kerugian akibat *illegal, unreported, and unregulated* (IUU) *fishing* yang telah terjadi. Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang baik pada sektor kelautan menjadi hal yang perlu diperhatikan serius. Inilah *concern* sekaligus sorotan penelitian ini.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan peneliti, terdapat sebuah usaha di sektor kelautan yang dalam melaksanakan usahanya tidak semata-mata memburu laba untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nama usahanya adalah UD. Putra Baru. Usaha ini memiliki keunikan tersendiri dalam pengelolaan usahanya, yang berporos pada sistem bagi hasil, pelibatan karyawan dalam penentuan margin² keuntungan juga menjadi hal menarik dari sistem di UD. Putra Baru.

Dalam sistem bagi hasil di UD. Putra Baru ini, baik ABK atau karyawan tidak mendapatkan *upah*. Penghasilan baik *juragan*, ABK dan karyawan diperoleh dari keuntungan yang dibagi dengan pemilik setelah bongkar muat

² Menurut KBBI “Margin” dapat diartikan laba bruto; tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar; deposit atau uang muka oleh investor dengan atau tanpa makelar yang merupakan pembayaran sebagian atau harga beli saham atau komoditas.

kapal. Penghasilan yang diperoleh tidak selalu sama di setiap bongkar muat. *Persenan* (gaji) yang diperoleh tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan yang didasarkan pada kinerja personal dan masa kerja. Penentuan bagi hasil yang dilakukan selalu berdasarkan pada kesepakatan mufakat antara pemilik, *juragan*, ABK dan karyawan biasa.

Margin yang terbentuk saat penjualan didasarkan pada risiko melaut. Penetapan atas besaran margin keuntungan bukan hanya ditentukan pemilik namun juga melibatkan juragan dan ABK. Dalam proses penjualan, penjual mengungkapkan apa adanya kepada pembeli termasuk perlakuan harga, dan pembeli masih diperbolehkan melakukan negosiasi sehingga terbentuk harga kesepakatan.

Penelitian ini akan difokuskan dalam ranah pengelolaan keuangan usaha kelautan yang memiliki keunikan tersendiri. Penelitian ini akan berangkat dari praktik bisnis orisinal sektor kelautan pada UD. Putra Baru yang memiliki keunikan dalam pengelolaan usahanya. Pengungkapan tentang niatan pemilik yang mengedepankan kebersamaan, proses penetapan margin keuntungan hingga bagi hasil yang selalu melibatkan pekerjaannya menjadi dasar pembahasan.

Keunikan ini menarik untuk dikuak mengingat kegiatan usaha semacam ini berbeda dengan praktik usaha yang selama ini kita kenal. Era di mana usaha modern cenderung menginginkan laba besar tanpa memperhatikan kepentingan pekerjaannya, usaha seperti antitesa terhadap praktik dominan usaha berlandaskan ideologi kapitalistik. Seiring dengan pusaran arus global yang lebih mengarah pada praktik kapitalistik. Praktik usaha yang secara orisinal ini lahir dan

berkembang di masyarakat ini masih menyimpan kearifan lokal nilai-nilai yang mungkin di gali dari Pancasila.

Usaha mempromosikan praktik-praktik bisnis beserta pola pengelolaan keuangan yang masih mempertahankan nilai-nilai kepancasilaan penting untuk dikemukakan. Penelitian Hanif *et al* (2013) mengungkapkan grup restoran Padang X memiliki keunikan tersendiri dalam tata kelolanya dengan bagi hasil. Untung dan rugi ditanggung bersama mencerminkan penyelenggaraan bisnis sebagai usaha yang berasaskan kekeluargaan, terdapat perlakuan akuntansi yang unik disebut sebagai prototipe akuntansi Pancasila. Riset ini adalah usaha lanjutan untuk mengungkapkan semangat serupa, menggali dan mempromosikan usaha-usaha berbasis nilai-nilai kearifan lokal Pancasila.

1.3 Rumusan Masalah

Guna menjawab rasa penasaran dan menguak keunikan serta mendapatkan pemahaman yang cukup dalam melaksanakan pengelolaan keuangan usaha, pertanyaan penelitian ini diawali dengan pertanyaan pertama yang mencuat dalam benak peneliti, yaitu adalah bagaimana pengelolaan keuangan yang terjadi dalam kegiatan usaha tersebut? Pengelolaan keuangan ini mencakup dari kegiatan usaha antara lain transaksi jual beli yang didalamnya mencakup penentuan margin, pembentukan harga jual, pelaksanaan penggajian dengan bagi hasil, serta proses pencatatan keuangan. Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang saling berkaitan satu sama lain. Setiap kegiatan inilah yang akan menunjukkan pola pengelolaan keuangan usaha UD. Putra Baru.

Pertanyaan penting berikutnya yang perlu diajukan adalah bagaimana pemaknaan para aktor terhadap pengelolaan usaha tersebut?. Hal tersebut penting diketahui untuk memahami dari hakikat pengelolaan usaha tersebut dari para pelaku langsung di lapangan.

Sebagai pembatas, penelitian ini hanya mengkaji pengelolaan keuangan yang dilaksanakan dalam kegiatan jual beli komoditas perikanan laut. Realita sosial yang terjadi di lapangan dan yang diketahui dari kondisi sebenarnya di lapangan akan diungkapkan dengan jelas secara keseluruhan dan apa adanya, yang kemudian akan dilihat dari sudut pandang ekonomi Pancasila. Namun perlu digarisbawahi munculnya kebijakan atas peraturan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia nomor 57/permen-kp/2014 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia berada di luar lingkup pembahasan dalam penelitian ini.

1.4 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada pertanyaan peneliti yang berfokus pada pengelolaan keuangan, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui secara keseluruhan pola pengelolaan keuangan termasuk didalamnya transaksi jual beli, perlakuan margin, pembentukan harga jual dan pelaksanaan bagi hasil. Setiap kegiatan yang terjadi tentu dapat diketahui dan terpetakan dengan pencatatan keuangan usaha dari keseluruhan transaksi yang terjadi.

Selanjutnya, sebagai langkah lanjutan, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemaknaan para aktor terhadap pengelolaan usaha yang dilakukan selama ini. Proses pengelolaan keuangan yang khas dalam praktik usaha di situs

penelitian ini penting diungkapkan dari para pelakunya bagaimana mereka memaknai seluruh aktivitasnya.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat serta kontribusi. Pertama, kontribusi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat sebagai bentuk bukti empiris perlakuan transaksi jual beli dalam sudut pandang Pancasila. Pemahaman atas realitas secara keseluruhan dalam setiap transaksi jual beli serta perlakuan akuntansinya akan memberikan landasan pengetahuan yang memadai untuk mengatasi persoalan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan transaksi usaha.

Kedua, kontribusi praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kebijakan bagi regulator dalam hal ini seluruh pihak yang berpengaruh dan memiliki otorisasi untuk dalam mengatur penyusun peraturan terkait pelaksanaan usaha tersebut, secara praktis dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi seluruh pihak untuk menyerap *output* penelitian berupa saran mengenai hasil penelitian.